

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Pupuk Kaltim sebagai Badan Usaha Milik Negara telah berperan sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, didasarkan kepada UUD 1945 disamping keberadaan usaha swasta dan koperasi. Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian Indonesia merupakan bukti nyata dari Negara berperan dalam menata kehidupan perekonomian nasional. Bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dikatakan sebagai pilar perekonomian Indonesia sejajar dengan kedua pelaku ekonomi yang nilainya sama dengan badan usaha swasta dan koperasi.
2. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pupuk Kaltim, dilaksanakan dengan :
 - a. PT. Pupuk Kaltim telah menerapkan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bagian dari strategy perusahaan. Dalam menjalankan fungsi CSR ini, perusahaan mengedepankan prinsip pendampingan (*stewardship*), dimana program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terutama dari segi ekonomi, bersifat partisipatif dan dapat meningkatkan kualitas hidup

masyarakat, mengembangkan wawasan dan meningkatkan ketrampilan mereka sehingga dapat mandiri secara ekonomi.

b. Bentuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT.

Pupuk Kaltim dalam program kemitraan dan pembinaan lingkungan industry kecil di kota Bontang, dengan pemanfaatan dana dari bagian laba operasional PT. PupukKaltim.

c. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan unit kerja Departemen yang dipimpin oleh KepalaDepartemen dan membawahi 2 (dua) bagian dan empat kantor cabang, yaitu :

- 1.) Bagian Administrasi dan Keuangan membawahi Seksi Analisa Kredit dan Pelaporan, Seksi Administrasi dan keuangan serta seksi Piutang dan Penagihan.
- 2.) Bidang Bina Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang merupakan unit kerja fungsional.
- 3.) Kantor Cabang Wilayah Program Kemitraan :
 - a) Kantor Cabang Kalimantan Timur
 - b) Kantor Cabang Kalimantan Selatan
 - c) Kantor Cabang Kalimantan Tengah
 - d) Kantor Cabang Kalimantan Barat

d. Program kemitraan dilaksanakan dengan berbagai cara :

a. Bantuan Pemodalanan bagi UKM

b. Pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan industri kecil untuk mengembangkan usahanya, yang meliputi :

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2) Peningkatan kemampuan manajerial
- 3) Peningkatan kemampuan teknik produksi
- 4) Peningkatan kemampuan promosi pemasaran

3. Berdasarkan analisa tentang faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi PT. Pupuk Kaltim dalam Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap industri kecil di Kota Bontang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. **Faktor Pendukung :**

1. Faktor internal

a. Besarnya potensi bisnis yang dihasilkan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur serta dikelola oleh pemerintah dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan program kemitraan dan bina lingkungan tersebut.

b. Faktor pendukung kedua adalah reputasi perusahaan yang dikenal sebagai salah satu kekuatan bisnis terkemuka baik di dalam negeri maupun luar negeri.

- c. Faktor pendukung ketiga adalah besarnya komitmen dari pihak manajemen PT. Pupuk Kaltim untuk melaksanakan program ini sebagai bentuk aksi sosial penerapan CSR BUMN kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Faktor eksternal

- a. Telah terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan PT. Pupuk Kaltim. Hubungan yang baik ini telah menciptakan kerja sama yang saling membutuhkan satu sama lain.
- b. Faktor lain yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program PKBL dan kemitraan oleh PT. Pupuk Kaltim adalah sikap antusiasme dan perilaku positif masyarakat dalam kepesertaan program.

b. Faktor Penghambat :

1. Faktor internal

- a. Kendala pertama, adalah jumlah dana yang ditetapkan sebagai target penyaluran tidak seluruhnya dalam bentuk tunai (cash). Namun sebagian merupakan pembiayaan bagi kegiatan pelatihan dan pembinaan managerial, selain itu dana tunai juga ditetapkan berdasarkan perkiraan pengembalian dana bergulir yang mencapai sekitar 45% dari total penyaluran.
- b. Kendala kedua, dropping dana kas dari bagian laba pada umumnya diterima paling awal Mei - Juni tahun berjalan atau setelah RUPS.

Hal tersebut terkait pengesahan dari alokasi dana (Laba) yang menjadi porsi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), ditetapkan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Faktor eksternal

- a. Adanya citra di masyarakat penerima pinjaman bahwa dana pinjaman BUMN ini merupakan hibah.
- b. Kendala kedua adalah, sebagian besar usaha kecil yang dibina adalah usaha mikro. Dimana para pengusaha kecil tersebut, pada umumnya belum dapat memisahkan keuangan hasil usaha dengan keuangan rumah tangga.
- c. Kendala ketiga yaitu tentang administrasi dan birokrasi yang sangat panjang, oleh karena harus menyertakan skala bisnis dan rencana pengembangan bisnis bagi unit usaha kecil. Namun hal ini lebih pada ketidaktahuan dan kurangnya wawasan (pengalaman) para pelaku usaha kecil tersebut dalam hal menyusun suatu proposal rencana bisnis (*business plan*).
- d. Kendala keempat, adalah kurangnya pemberitaan serta sosialisasi adanya program kemitraan bina lingkungan dari PT. Pupuk Kaltim. Sehingga muncul kesan seolah-olah program ini hanya ditujukan pada kalangan tertentu saja.

- e. Faktor penghambat kelima dalam program bina lingkungan ini adalah adanya perilaku beberapa mitra binaan yang seringkali tidak mengikuti prosedur yang ada secara benar.

B. Saran

Berdasarkan serangkaian pembahasan yang telah dilakukan dan demi pengembangan dan perbaikan bagi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di masa mendatang, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dilaksanakan lomba antar mitra binaan dari berbagai instansi baik swasta maupun BUMN, sehingga dapat memberikan pandangan yang positif kepada masyarakat, bahwa dunia industri juga menjalankan fungsi sosial secara nyata kepada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat sekitarnya disamping mencari keuntungan dan menimbulkan polusi semata.
2. Sosialisasi dan publikasi tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilaksanakan lebih intensif, sehingga diketahui oleh masyarakat luas.